



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN DAN DESA
Jalan Raya Parigi No. 180 Dsn Kemplung Ds Karangbenda Parigi-Pangandaran
Telp. (0265) 2640972 Parigi 46393. Email: dinsospmd.pangandaran@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR :050/Kpts. 002.a-DINSOSPMD.1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PADA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025**

KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

26. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 56);

49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagaimana Diktum KESATU *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran I.

- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan KEPALA DINSOSPMD ini dibebankan kepada DPA DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala DINSOSPMD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 8 Januari 2026

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. TRISNO

NIP. 19740317 199311 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 050/ Kpts. 002.a -DINSOSPMD.1/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025

- I. Penanggungjawab : Kepala DINSOSPMD
- II. Ketua : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan
- IV. Anggota : 1. Unsur Bidang Sosial;
2. Unsur Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Unsur Bidang Pekmas Lemadat;
4. Unsur Bidang PKAPD;
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran;
7. Operator Perencanaan;
8. Operator Keuangan;
9. Operator Barang;

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 8 Januari 2026

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. TRISNO

NIP. 19740317 199311 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 050/ Kpts. 002.a –DINSOSPMD.1/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025

a. **Penanggungjawab**, mempunyai tugas :

- 1) Mengkoordinasikan secara umum mengenai proses penyusunan dan penetapan Renstra;
- 2) Memberi arahan dan masukan dalam proses penyusunan dan penetapan;
- 3) Mempertanggungjawabkan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan berikut hasilnya.

b. **Ketua**, mempunyai tugas :

- 1) Mempelajari Tujuan dan Sasaran Kabupaten;
- 2) Mempelajari arah kebijakan Kabupaten;
- 3) Mempelajari isu – isu strategis Kabupaten;
- 4) Mempelajari Program Prioritas Kabupaten;
- 5) Mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
- 6) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab.

c. **Sekretaris**, mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 lingkup internal DINSOSPMD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- 2) Membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
- 3) Membantu Ketua dalam membuat laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

d. **Anggota**, mempunyai tugas :

- 1) Membantu Ketua dalam mempelajari arah kebijakan Kabupaten;

- 2) Membantu Ketua dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
- 3) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 8 Januari 2026

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. TRISNO

NIP. 19740317 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena limpahan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran merupakan Laporan Tahunan yang dapat memberikan gambaran capaian program tahun 2025, Rencana Kinerja tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, sekaligus dijadikan dasar/ pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi optimalisasi kinerja pembangunan di Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yang transparan dan memenuhi unsur akuntabilitas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut menyempurnakan LAKIP ini. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan LAKIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai informasi kegiatan dan evaluasi pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 27 Januari 2026
KEPALA,
DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN



Drs. TRISNO
NIP. 19740317 199311 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2025 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran melaporkan capaian kinerja (*Performance result*) selama tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran.

ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. SASARAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2
3. ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
1. PERENCANAAN	8
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	10
3. LAPORAN ANGGARAN PERSASARAN	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN	59
C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	62
D. TINGKAT EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	68
BAB IV PENUTUP	71
DAFTAR LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah	3
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran.....	9
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	9
Tabel 2.3 Kebijakan dan Program	10
Tabel 2.4 Target Kinerja Sasaran.....	11
Tabel 2.5 Target Kinerja Program	15
Tabel 2.6 Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025	17
Tabel 2.7 Laporan Anggaran Per Sasaran Tahun 2025	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja	25
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja PD Per Sasaran	25
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja PD Per Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	35
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah	54
Tabel 3.6a Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Standar Nasional.....	56
Tabel 3.6b Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan DINSOS Kab. Ciamis dan DPMD Kab. Ciamis	57
Tabel 3.7 Analisis Penyebab penurunan kinerja dan solusi yang di lakukan	58
Tabel 3.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	58
Tabel 3.9 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja	58
Tabel 3.10 Analisis Realisasi Program	60
Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran	62
Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....	63
Tabel 3.13 Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	69
Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian yang penting dalam proses pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang telah diterbitkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana selanjutnya diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pelaporan kinerja adalah tahap ke-5 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang berlaku. Peraturan Presiden ini secara tegas menyatakan tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu: 1) Rencana Strategis, 2) Perjanjian Kinerja, 3) Pengukuran Kinerja, 4) Pengelolaan Data Kinerja, 5) Pelaporan Kinerja, 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah wajib menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan diinstruksikan kepada setiap kepala daerah agar melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Mekanisme dan tahapan teknis, substantif, dan koordinasi teknis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah. Laporan ini berisi mengenai pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Sasaran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna merumuskan rencana pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*. Visi

juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2025-2029) Kabupaten Pangandaran adalah:

"PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN WISATA PANGANDARAN MENDUNIA DENGAN MENITIKBERATKAN PADA PENDIDIKAN AGAMA DAN KARAKTER"

B. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah serta faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tabel 1.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi	Misi
PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN WISATA PANGANDARAN MENDUNIA DENGAN MENITIKBERATKAN PADA PENDIDIKAN AGAMA DAN KARAKTER	1. Mempermudah Akses Dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan 2. Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Pendidikan 3. Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan 4. Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman Dan Berkesinambungan 5. Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketakwaan, Dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama Dan Wawasan Kebangsaan 6. Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan 7. Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani 8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan

isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif
6. Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif
8. Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa

Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang mengartikulasikan tujuan serta menggambarkan tahap untuk mencapai sebuah tujuan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk pada rumusan tujuan di atas maka berikut disajikan hasil rumusan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029 :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
3. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur
4. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana
7. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata melalui tata kelola yang berkelanjutan;
8. Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian Daerah;

9. Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan Daerah;
10. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat;
11. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
12. Meningkatnya tingkat ketahanan pangan Daerah;
13. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas
14. meningkatnya Kinerja tata kelola keuangan Daerah;
15. meningkatnya sistem inovasi Daerah dan kolaborasi lintas sektor;
16. Meningkatnya perekonomian wilayah;
17. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
18. Masyarakat desa yang berdaya saing.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yaitu misi 8. , Dalam menunjang misi ke delapan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh satu tujuan dan enam sasaran yaitu ;

Tujuan :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD
2. Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS
3. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS
4. Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial
5. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas
6. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan

Sasaran tersebut Menjadikan masyarakat Pangandaran lebih sejahtera dengan Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan

Masyarakat Hukum Adat, dan Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran ingin Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa dengan bantuan dan dukungan OPD menjadikan masyarakat yang mandiri, maju dan sejahteran. Hal ini bisa menjadikan Pangandaran mempunyai masyarakat berkualitas yang bisa dikenal oleh masyarakat luar daerah maupun dunia. Hal ini sejalan dengan Visi ini berkaitan dengan visi Kabupaten Pangandaran yaitu Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa.

1.3 Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Isu – Isu Strategis

Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan PPKS melalui program-program yang tepat.
3. Peningkatan kualitas pelayanan Publik khususnya PPKS melalui pengembangan SDM dan peningkatan aksesibilitas.

2. Tema dan Prioritas Pembangunan di tahun 2025

Tema RKPD tahun 2025 yaitu : “Peningkatan Daya Saing Daerah ”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya
3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan
4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas sertaKonektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis

6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. PERENCANAAN

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yang berkaitan dengan Visi dan Misi Pembangunan

Daerah Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD
		Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
		Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya
		Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi /Akreditasi
		Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri
		Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan

b. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis dan indikator Kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rensrta akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tabel 2.3
Kebijakan dan Program

NO	Kebijakan	PROGRAM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	
3	Peningkatan Pembinaan Kapasitas BUMDES	
4	Peningkatan Kapasitas Pendamping Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Posyandu	
6	Pengadaan Alat Bantu, Penanganan SPM serta Peningkatan Pembinaan PSKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL dan PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah	
8	Pemberian Bantuan Sembako dan Alat Bantu Disabilitas Bagi Keluarga Miskin	
9	Pembentukan Kampung Siaga Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
10	Fasilitasi Pembuatan Kartu Jamkesda atau BPJS Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
11	Pengusulan, Penambahan dan Penyelenggaraan BIMTEK Pegawai ke BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

1. Target Kinerja Sasaran

Tabel 2.4
Target Kinerja Sasaran

a. Target Kinerja Sasaran Kepala Dinas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	67%
3.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	76,25

b. Target Kinerja Sasaran Sekretaris Dinas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	94 %
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	94 %

c. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam	75 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	(PPKS)	penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
		Persentase Meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %
		Persentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10 %
		Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mampu bertahan hidup	100 %
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola	100 %

d. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%

e. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	100%

f. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Adminitrasi Desa yang baik dan tertib	65%

g. Target Kinerja Sasaran Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	%	96
			Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	%	100
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100
			Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	88

h. Target Kinerja Sasaran Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100

i. Target Kinerja Sasaran Pekerja Sosial Ahli Muda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	Orang	1200
			Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	KK	200

j. Target Kinerja Sasaran Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Jumlah Desa yang bina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	93

k. Target Kinerja Sasaran Fungsional Bendahara Umum Pengeluaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang

l. Target Kinerja Sasaran Penelaah Teknis Kebijakan

No	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13
		Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	17.064
				Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan	Keluarga	300

No	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
				keluarga kewenangan kabupaten/kota		
		Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mampu bertahan hidup	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	61
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah makam taman pahlawan yang dipelihara	Makam	31

2. Target Kinerja Program

Tabel 2.5
Target Kinerja Program

NO	SASARAN	PROGRAM	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
			INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	65%	158.921.230,00
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif	100%	463.905.000,00
3	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatkan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90%	44.000.000,00
4	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan	90%	4.494.920.500,00

NO	SASARAN	PROGRAM	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
			INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6
	sosial Bagi PPKS		Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		
5	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	15%	1.321.775.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	628.790.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	30.918.880,00
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	84%	3.093.767.793,00
			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
			3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
			4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	

3. TARGET KINERJA KEGIATAN

Tabel. 2.6
Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	84%	3.093.767.793,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	10.200.000,00
				2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%	
				3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.200.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	2.265.274.207,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	19 Orang	2.246.674.207,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	18.600.000,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8 Jenis	10.200.000,00
					278 Unit/Buah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.200.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	8.400.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	8.400.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	96%	116.393.294,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.768.005,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket	46.790.144,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket	2.213.205,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1 Paket	1.582.900,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Disediakan		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.079.040,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	37.960.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	230.000.000,00
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	230.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	344.088.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77.500.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	264.588.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	109.212.292,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	57.320.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	45.875.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	15 Unit	3.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.017.292,00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Presentase meningkatkan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90%	44.000.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	13 Orang	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	44.000.000,00
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%	4.494.920.500,00
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	1791 Orang	74.123.000,00
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	33.438.000,00
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1771 Orang	40.685.000,00
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	10 KK	4.420.797.500,00
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	15.400.000,00
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.405.397.500,00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%	1.321.775.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1 Dokumen	1.321.775.000,00
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	239942 Orang	353.475.000,00
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	13490 Keluarga	16.800.000,00
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	327 Keluarga	951.500.000,00
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	628.790.000,00
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	2 Desa	100.000.000,00
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	100.000.000,00
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2 Desa	528.790.000,00
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang	528.790.000,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	30.918.880,00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Taman	30.918.880,00
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31 Makam	30.918.880,00
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	65%	158.921.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93 Desa	158.921.230,00
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	4.030.000,00
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	8.400.000,00
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	72.038.000,00
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	186 Orang	22.631.930,00
			pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	35.021.300,00
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	8.400.000,00
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	8.400.000,00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	463.905.000,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5 Lembaga	463.905.000,00
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	345.800.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Laporan	14.795.000,00
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	36.510.000,00
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	66.800.000,00

3. Laporan Anggaran per Sasaran

Tabel 2.7
Laporan Anggaran per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	3.093.767.793
2	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	1.981.483.880,00
3	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	4.494.920.500
4	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	44.000.000
5	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	158.921.230
6	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	463.905.000
JUMLAH		10.236.998.403

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tujuan berjalan dengan target kinerja 5 (lima) Tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan sasaran kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independent demi menilai indikator, indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program /kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan lain dengan dan kegagalan pencapaian sasaran pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target

dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja di kutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.

Tabel : 3.1 skala nilai peringkat kinerja

No	Rencana Capaian	Kategori Capaian
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Baik
3	$66 \leq 75$	Cukup Baik
4	$51 \leq 65$	Kurang baik
5	≤ 50	Sangat Kurang Baik

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut ;

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, Metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, apabila semakin tinggi realisasi di interprestasikan sangat baik (melebihi target) dan menunjukan semakin tingginya kinerja, atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukan tidak tercapai target/sangat rendah berarti kinerja rendah.

Adapun capaian kinerja tahun 2025 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di bawah ini :

a. Pengukuran capaian kinerja PD Per Sasaran

Tabel : 3.2 Pengukuran capaian kinerja PD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2025	2025	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	70,11%	70,95%	101,20%
2	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan	17%	30,73%	180,77%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2025	2025	2025
		dasar			
3	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhannya	91%	95,31%	104,74%
4	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi	30%	76,47%	254,90%
5	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri	100%	100,00%	100,00%
6	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	100,00%	100,00%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi target Sasaran dapat tercapai dengan **Sangat Baik**, dikarenakan pencapaian dari setiap target Sasaran melebihi range **91%** . Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran adalah sebagai berikut :

- Indikator Sasaran yang Pertama Nilai LHE AKIP Dinsos PMD dengan Target nilai 70,11 % dan terealisasi dengan nilai 70,95 % dengan pencapaian 101,20%.

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai Evaluasi (%)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00	18,00
Jumlah		100	70,95
Interpretasi Hasil Evaluasi		BB= Sangat Baik	

Sumber LHE AKIP Pada DINSOPMD Tahun 2025 Nomor R/700.1.2.8/107.i/Insp.03/2025 Tanggal 25 Juni 2025

- Indikator Sasaran yang kedua yaitu Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 17 % dan terealisasi dengan nilai 30,73% dengan pencapaian 180,77% .
- Indikator Sasaran yang Ketiga yaitu Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya dengan Target nilai 91% dan terealisasi dengan nilai 95,31% dengan pencapaian 104,74%.
- Indikator Sasaran yang Keempat yaitu Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi dengan target nilai 30 % dan terelisasi 76,47% dengan pencapaian 254,90%.
- Indikator Sasaran yang Kelima yaitu Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri dengan Target nilai 100% dan terealisasi dengan nilai 100,00% dengan pencapaian 104,74%.
- Indikator Sasaran yang Keenam yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan dengan Target nilai 100% dan terealisasi dengan nilai 100,00% dengan pencapaian 100,00%.

b. Pengukuran capaian kinerja PD Per Program dan Kegiatan

Tabel 3.3 Pengukuran capaian kinerja PD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN				ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGE T	REALIS ASI TARGE T	CAPAI AN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	84%	84%	100%	3.093.767.793,00
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100%	
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	100%	100%	
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%	100%	
		Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	10.200.000,00

				2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	
				3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	10.200.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	100%	100%	2.265.274.207,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	19 Orang	19 Orang	100%	2.246.674.207,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	18.600.000,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8 Jenis	8 Jenis	100%	10.200.000,00
					278 Unit/Buah	278 Unit/Buah	100%	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6 Laporan	100%	10.200.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%	8.400.000,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8.400.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%	116.393.294,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	2.768.005,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	46.790.144,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	2.213.205,00

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1.582.900,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	25.079.040,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	37.960.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	100%	100%	230.000.000,00
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	230.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	100%	100%	344.088.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6 Laporan	100%	2.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	77.500.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	264.588.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	100%	100%	109.212.292,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100%	57.320.000,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	11 Unit	100%	45.875.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	100%	3.000.000,00

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	3.017.292,00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Presentase meningkatkan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90%	90,00%	100%	44.000.000,00
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	13 Orang	13 Orang	100%	44.000.000,00
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	13 Orang	100%	44.000.000,00
3	PROGRAM REHABILITAS I SOSIAL			Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	90%	90%	100%	4.494.920.500,00
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	1791 Orang	1846 Orang	103%	74.123.000,00
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	90 Orang	450%	33.438.000,00
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1771 Orang	1771 Orang	100%	40.685.000,00

		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	50 KK	50 KK	100,00%	4.420.797.500,00
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100,00%	15.400.000,00
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4.405.397.500,00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	15%	15%	100%	1.321.775.000,00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.321.775.000,00
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	239942 Orang	239942 Orang	100,00%	353.475.000,00
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	13490 Keluarga	13490 Keluarga	100,00%	16.800.000,00
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	327 Keluarga	647 Keluarga	198%	951.500.000,00
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhannya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	100%	100%	628.790.000,00

		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100.000.000,00
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	307 Orang	82,97 %	100.000.000,00
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2 Desa	2 Desa	100,00%	528.790.000,00
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang	61 Orang	100,00%	528.790.000,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Presentase Taman Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	100%	100%	30.918.880,00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Taman	1 Taman	100%	30.918.880,00
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31 Makam	31 Makam	100%	30.918.880,00
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	65%	65%	100%	158.921.230,00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93 Desa	93 Desa	100%	158.921.230,00
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4.030.000,00
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8.400.000,00

			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	72.038.000,00
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	186 Orang	186 Orang	100%	22.631.930,00
			pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	35.021.300,00
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8.400.000,00
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8.400.000,00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	100%	100%	463.905.000,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	463.905.000,00
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	345.800.000,00

			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%	14.795.000,00
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	1 Laporan	33,33 %	36.510.000,00
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	66.800.000,00

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis perlu adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerja tahun berjalan. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (2024) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya (2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	70,11%	70,95%	70,10%
2	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	17%	30,73%	N/A
3	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	91%	95,31%	N/A
4	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi	30%	76,47%	30%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
5	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri	100%	100,00%	100%
6	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	100,00%	100%

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- Indikator Sasaran yang Pertama yaitu Nilai LHE AKIP Dinsos PMD tahun 2025 sebesar 70,11 dan terealisasi dengan 70,95 % atau ada peningkatan sebesar 0,95 %.
- Indikator Sasaran yang Kedua yaitu Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2025 dengan target 17% dan terelaisasi 30,73% ada peningkatan sekitar 13,73%.
- Indikator Sasaran yang Ketiga yaitu Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya tahun 2025 dengan target nilai 91% dan terrealisasi dengan nilai 95,31% ada peningkatan sekitar 4,31%.
- Indikator sasara yang Keempat yaitu Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi Tahun 2025 dengan target nilai 30% dan terealisasi sebesar 76,47% dan realisasi tahun 2024 sebesar 30% dari hal tersebut ada peningkatan sebesar 46,47%.
- Indikator sasaran yang Kelima yaitu Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri dengan target nilai tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi pada tahun 2025 100% dan untuk tahun 2024 realisasinya masih sama sebesar 100%.
- Untuk Indikator sasaran yang Keenam yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan tahun 2025 dengan target nilai 100% dan realisasi pada tahun 2025 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya (2024)

Untuk penyajian tabel Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 sebagai berikut ;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93%	93%	100,00%	84%	84%	100%
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	93%	93%	100,00%	100%	100%	100%
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
				2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
				3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	19 Orang	19 Orang	100%	19 Orang	19 Orang	100%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
					208 Unit/Buah	208 Unit/Buah	100%	278 Unit/Buah	278 Unit/Buah	100%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	96%	96%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Kegiatan	90 Kegiatan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			0	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	84%	84%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	100%	9 Unit	11 Unit	100%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Presentase meningkatkan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90%	68%	75%	90%	90%	100%
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	13 Orang	13 Orang	100%	13 Orang	13 Orang	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	13 Orang	100,00%	13 Orang	13 Orang	100%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%	8%	100,00%	90%	90%	100%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	1200 Orang	221 Orang	18,42%	1791 Orang	1846 Orang	103%
3			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	41 Orang	205%	20 Orang	90 Orang	450%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	180 Orang	100%	1771 Orang	1771 Orang	100%
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	150 KK	4 KK	3%	50 KK	50 KK	100%
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	4 Orang	2%	50 Orang	50 Orang	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%	10%	100%	15%	15%	100%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18770 Orang	19037 Orang	101%	239942 Orang	239942 Orang	100%
4			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	115666 Keluarga	242720 Keluarga	209,85%	13490 Keluarga	13490 Keluarga	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1050 Orang	350%	327 Keluarga	647 Keluarga	198%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	2 Desa	2 Desa	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	71 Orang	61 Orang	85,92%	370 Orang	307 Orang	83%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
5		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2 Desa	2 Desa	100%	2 Desa	2 Desa	100%
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	71 Orang	61 Orang	86%	61 Orang	61 Orang	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam	1 Taman Makam	100%	1 Taman	1 Taman	100%
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31 Makam	31 Makam	100%	31 Makam	31 Makam	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	60%	60%	100%	65%	65%	100%
7		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93 Desa	93 Desa	100%	93 Desa	93 Desa	100%
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0	0	0	186 Orang	186 Orang	100%
			pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	1	1	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	2 Lembaga	2 Lembaga	1	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN						
				INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
				Adat						
9			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	2 Laporan	67%	3 Laporan	1 Laporan	33%
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2025	Target Jangka Menengah	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Realisasi s/d Tahun 2025	Target Jangka Menengah
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri	100%	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	65%	80%
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi		60%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatkan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90%	100%
4	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	95,31 %	96%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	90,0%	95,0%
5	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30,73 %	102%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	25,0%	100,00 %
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang	100%	100%

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2025	Target Jangka Menengah	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Realisasi s/d Tahun 2025	Target Jangka Menengah
						terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup		
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPM D	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	70,11	80,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	84%	89%
						2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%
						3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	100%
						4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran Tahun 2024 dan target RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Sasaran yang pertama yaitu Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri pada tahun 2024 mendapat 100%. Dengan hasil tersebut Artinya sudah memenuhi Target Jangka Menengah sebesar 100%.
2. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2024 mendapat 152,41%. Dengan hasil tersebut Artinya sudah melebihi Target Jangka Menengah sebesar 77%.

3. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Nilai LHE AKIP Dinsos PMD pada tahun 2024 mendapat nilai 70,10. Dengan hasil tersebut Artinya tinggal 11,15 untuk memenuhi Target Jangka Menengah sebesar 81,25-85,00.
 4. Untuk Program yang tercantum pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran dan Realisasi Program tercapai 100% dengan target yang di tentukan di RPJMD Kabupaten Pangandaran,
- 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional/Provinsi dan Kabupaten Kota**

Tabel 3.6a

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri	100%	N/A
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	N/A
3	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi	90%	N/A
4	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	95,31%	N/A
5	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30,73%	N/A
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	70,95%	N/A

- Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran Tahun 2025 dan Standar Nasional 2025 adalah sebagai berikut :
1. Untuk Indikator Sasaran yang pertama yaitu Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri pada tahun 2025 mendapat 100%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.

2. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan pada tahun 2025 mendapat 100%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.
3. Untuk Indikator Sasaran yang ketiga yakni Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi pada tahun 2025 mendapat nilai 90%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.
4. Untuk Indikator Sasaran yang Keempat yakni Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya pada tahun 2025 mendapat nilai 95,31%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.
5. Untuk Indikator Sasaran yang Kelima yakni Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2025 mendapat nilai 30,73%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.
6. Untuk Indikator Sasaran yang Keenam yakni Nilai LHE AKIP DINSOSPMD pada tahun 2025 mendapat nilai 70,95%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.

Tabel 3.6b
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan DINSOS Kab. Ciamis dan DPMD Kab. Ciamis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kab. Ciamis 2025	Perbandingan
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri	100%	85.27%	Lebih Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	N/A	
3	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi	90%	N/A	

4	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	95,31%	99.12%	Lebih Rendah
5	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30,73%	99.12%	Lebih Rendah
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	70,95%	N/A	

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran Tahun 2024 dan Realisasi Kabupaten Ciamis Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, realisasi Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri Dinsospmd Kabupaten Pangandaran tahun 2024 sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri Kabupaten Ciamis sebesar 85.27%.
- 2. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, realisasi Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2024 sebesar 152,41% lebih tinggi dari realisasi Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Ciamis sebesar 98,91%.
- 3. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, realisasi Nilai LHE AKIP Dinsos PMD tahun 2024 sebesar 70,10 lebih rendah dari realisasi Nilai SAKIP Kabupaten Ciamis sebesar 79,10 karena Kabupaten Ciamis masih menggunakan Permendagri 86 Tahun 2017.

5. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.7
Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran	Penurunan	Solusi
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Tidak ada Penurunan	
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Tidak ada Penurunan	

3	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Tidak ada Penurunan	
4	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	Tidak ada Penurunan	
5	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Tidak ada Penurunan	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Tidak ada Penurunan	

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	EFISIENSI/TIDAK EFISIENSI	ALASAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Efisien	
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Efisien	
3	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Efisien	
4	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	Efisien	
5	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Efisien	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Efisien	

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Tabel 3.9
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG	PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
3	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
4	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
5	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

B. Realisasi Anggaran

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yaitu misi ke 8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa Dalam menunjang misi ke 8 Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh enam sasaran yaitu ;

1. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas .
2. Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan
3. Meningkatkan Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS
5. Meningkatkan Jaminan Sosial Bagi PPKS
6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD

Berdasarkan sasaran strategis yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dengan total pagu anggaran perubahan 2025 sebesar Rp. 10,236,998,403.00 terealisasi sebesar Rp. 8,783,829,818.00 dengan persentase capaian sebesar 85,80%. Untuk melihat efektifitas dan efisiensi anggaran masing- masing sasaran dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10
Analisis Realisasi Program

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	158.921.230,00	105.303.730,00	66,26%
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	463.905.000,00	382.164.000,00	82,38%
					622.826.230,00	487.467.730,00	78,27%
3	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi	95.31%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00%

4	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	104,74%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.494.920.500,00	3.563.793.400,00	79,28%
5	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30.73%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.321.775.000,00	1.248.606.250,00	94,46%
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	628.790.000,00	503.965.830,00	80,15%
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	30.918.880,00	26.063.000,00	84,29%
					6.520.404.380,00	5.386.428.480,00	82,61%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	101.20%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.093.767.793,00	2.909.933.608,00	94,06%
Jumlah					10.236.998.403,00	8.783.829.818,00	85,80%

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, pencapaian sasaran misi ke 8 RPJMD Kabupaten Pangandaran yang ditunjang oleh Sasaran Renstra OPD yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD” dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 3.093.767.793,00 terealisasi sebesar Rp. 2.909.933.608,00 atau apabila di persentasekan sebesar 94,06%, sementara capaian kinerjanya sebesar 101.20%. Untuk Sasaran Renstra OPD ke 2 yaitu “Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan” dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 463.905.000,00 terealisasi sebesar Rp. 382.164.000,00 atau apabila di persentasekan sebesar 82,38%, sementara capaian kinerjanya sebesar 100%. Sasaran Renstra OPD yang ke 3 yaitu “Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial” dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 44.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 44.000.000,00 atau apabila di persentasekan sebesar 100,00%, sementara capaian kinerjanya sebesar 95.31%. Sasaran Renstra OPD yang ke 4 yaitu “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitas sosial Bagi PPKS” dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 4.494.920.500,00 terealisasi sebesar Rp. 3.563.793.400,00 atau apabila di persentasekan sebesar 79,28% sementara capaian kinerjanya sebesar 104,74%. Sasaran Renstra OPD yang ke 5 yaitu “Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS” dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 1.981.483.880,00 terealisasi sebesar Rp. 1.778.635.080,00 atau apabila di persentasekan sebesar 89,76% sementara capaian kinerjanya sebesar 30.73%. Sedangkan untuk Sasaran Renstra OPD yang ke 6 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD” dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 3.093.767.793,00 terealisasi sebesar Rp. 2.909.933.608,00 atau apabila di persentasekan sebesar 94,06% sementara capaian kinerjanya sebesar 101.20%.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dansasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No	Sasaran	Indiator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	target	Realisasi	Capaian Realisasi	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	70,11%	70,95%	101,20%	3.093.767.793,00	2.909.933.608,00	94,06%	7,14%
2	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	17%	30,73%	180,77%	1.981.483.880,00	1.778.635.080,00	89,76%	91,00%
3	Meningkatnya Pelayanan Rahabiiitas sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	91%	95,31%	104,74%	4.494.920.500,00	3.563.793.400,00	79,28%	25,45%
4	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi	30%	76,47	254.90%	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00%	154,90%

No	Sasaran	Indiator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	target	Realisasi	Capaian Realisasi	Anggaran	Realisasi	Capaian	
5	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri	100%	100,00%	100,00%	158.921.230,00	105.303.730,00	66,26%	33,74%
6	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	100,00%	100,00%	463.905.000,00	382.164.000,00	82,38%	17,62%

Bagian yang disajikan dalam tabel tersebut diatas terkait dengan capaian kinerja dan efisiensi anggaran untuk sasaran dimana dari sisi capaian kinerjanya terlihat 1 (satu) indikator sasaran yang mencapai lebih dari 100%, 1 (satu) indikator sasaran yang mencapai 100%, dan 1 (satu) indikator sasaran strategis yang menunjukkan pencapaian kurang dari 100%. Namun demikian dari sisi efisiensi pengguna sumber daya terdapat efisiensi anggaran disetiap indikator tujuan/sasaran. Kondisi ini sudah sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Indiator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	target	Realisasi	Capaian Realisasi	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	60%	60%	100.00%	249,706,600.00	133,371,400.00	53.41%	46.59%
1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93 Desa	93 Desa	100.00%	249,706,600.00	133,371,400.00	53.41%	46.59%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif	100%	100%	100.00%	1,475,172,947.00	1,237,565,500.00	83.89%	16.11%

No	Program dan Kegiatan	Indiator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	target	Realisasi	Capaian Realisasi	Anggaran	Realisasi	Capaian	
2.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	1,475,172,947.00	1,237,565,500.00	83.89%	16.11%
3	Program Penataan Desa	Presentase penataan desa	60%	12%	20.00%	20,000,000.00	19,999,500.00	99.998 %	- 80.00%
3.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang di tata	93 Desa	8 Desa	8.60%	20,000,000.00	19,999,500.00	99.998 %	- 91.40%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggara n kesejahteraan sosial	70%	70%	100.00%	113,000,000.00	54,000,000.00	47.79%	52.21%
		Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggara n kesejahteraan sosial	90%	90%					
4.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	13 Orang	13 Orang	100.00%	113,000,000.00	54,000,000.00	47.79%	52.21%
		Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1 Lembaga	1 Lembaga	100.00%				
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%	1.50%	18.75%	1,339,278,785.00	207,522,000.00	15.50%	3.25%
5.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	1200 Orang	211 Orang	18.42%	262,746,354.00	95,792,000.00	36.46%	- 18.04%
5.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	150 KK	4 KK	2.67%	1,076,532,431.00	111,730,000.00	10.38%	-7.71%
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%	10%	100.00%	3,160,151,210.00	1,881,216,810.00	59.53%	40.47%
6.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	3,160,151,210.00	1,881,216,810.00	59.53%	40.47%

No	Program dan Kegiatan	Indiator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	target	Realisasi	Capaian Realisasi	Anggaran	Realisasi	Capaian	
7	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	100%	100.00%	659,717,752.00	332,751,000.00	50.44%	49.56%
7.1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2 Desa	2 Desa	100.00%	659,717,752.00	332,751,000.00	50.44%	49.56%
8	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	100%	100.00%	98,058,347.00	46,010,000.00	46.92%	53.08%
8.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam	1 Taman Makam	100.00%	98,058,347.00	46,010,000.00	46.92%	53.08%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93%	93%	100.00%	3,680,541,507.00	3,114,376,309.00	84.62%	15.38%
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%					
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	93%	93%					
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%					
9.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100.00%	28,084,400.00	13,477,000.00	47.99%	52.01%
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100.00%				
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100.00%				
9.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	100%	100.00%	2,893,618,800.00	2,495,520,163.00	86.24%	13.76%
9.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8 Jenis	8 Jenis	100.00%	27,390,000.00	13,020,000.00	47.54%	52.46%
			208 Unit/Buah	208 Unit/Buah	100.00%				
9.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100.00%	22,434,400.00	10,500,000.00	46.80%	53.20%
9.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	96%	96%	100.00%	147,748,703.00	141,178,146.00	95.55%	4.45%
9.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	100%	100.00%	230,000,000.00	230,000,000.00	100.00 %	0.00%

No	Program dan Kegiatan	Indiator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	target	Realisasi	Capaian Realisasi	Anggaran	Realisasi	Capaian	
9.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	100%	100.00%	227,912,800.00	125,374,999.00	55.01%	44.99%
9.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	84.00%	84.00%	100.00%	103,352,404.00	85,306,001.00	82.54%	17.46%

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan capaian kinerja berikut tingkat efisiensi anggarannya pada antara program dan kegiatan, digambarkan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa capaian keuangannya sebesar 53,41% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 46,59%, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa capaian keuangannya sebesar 53,41% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 46,59%.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat capaian keuangannya sebesar 83.89% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 16.11% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 2.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 83.89% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 16.11%.
3. Program Penataan Desa capaian keuangannya sebesar 99.998% sedangkan capaian kinerjanya 20 % dan efisiensi anggaran sebesar - 80.00% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 3.1 Penyelenggaraan Penataan Desa capaian keuangannya sebesar 99.998% sedangkan capaian kinerjanya 20 % dan efisiensi anggaran sebesar - 91.40%.
4. Program Pemberdayaan Sosial capaian keuangannya sebesar 47.79% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 52.21% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 4.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 47.79% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 52.21%.

5. Program Rehabilitasi Sosial capaian keuangannya sebesar 15.50% sedangkan capaian kinerjanya 18.75% % dan efisiensi anggaran sebesar 3.25% terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 5.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial capaian keuangannya sebesar 36.46% sedangkan capaian kinerjanya 18.75% dan efisiensi anggaran sebesar -18.04%;
 - 5.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial capaian keuangannya sebesar 10.38% sedangkan capaian kinerjanya 2.67% dan efisiensi anggaran sebesar -7.71% %.
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial capaian keuangannya sebesar 59.53% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 40.47% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 6.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 59.53% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 40.47%.
7. Program Penangan Bencana capaian keuangannya sebesar 50.44% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 49.56% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 7.1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 50.44% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 49.56%.
8. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan capaian keuangannya sebesar 46.92% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 53.08% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 8.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 46.92% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 53.08%.
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 86,62% sedangkan capaian kinerjanya 100% dan efisiensi anggaran sebesar 15,39%, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu:
 - 9.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 47,99% sedangkan capaian kinerjanya 100% dan efisiensi anggaran sebesar 52,01%;

- 9.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 86,24% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 13,76%;
- 9.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 47,54% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 52,46%;
- 9.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 46,80% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 53,20%;
- 9.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 95,55% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 4,45%;
- 9.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian keuangannya sebesar 100,00% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 0%;
- 9.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah capaian keuangannya sebesar 55,01% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 44,99%;
- 9.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah capaian keuangannya sebesar 82,54% sedangkan capaian kinerjanya 100% dan efisiensi anggaran sebesar 17,46%;

Terlihat dari 8 (Delapan) program, 6 program menunjukkan pencapaian kinerja 100%, sementara 2 Program hanya menunjukan pencapaian kinerja 20% dan 18,75%. Namun demikian terdapat efisiensi anggaran disetiap program dan kegiatan yang berhasil dicapai. Kondisi ini dikarenakan penyerapan anggaran untuk program dan kegiatan tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah.

Secara umum pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2025 yang tercantum dalam Renstra Perubahan DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat

dikatakan efektif dan efisien terhadap pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

D. Tingkat Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Rata - Rata Capaian Sasaran	Anggaran	
				Realisasi Rp.	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	101,20%	2.909.933.608,00	94,06%
2	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	180,77%	1.778.635.080,00	89,76%
3	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	104,74%	3.563.793.400,00	79,28%
4	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi	254,90%	44.000.000,00	100,00%
5	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri	100,00%	105.303.730,00	66,26%
6	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00%	382.164.000,00	82,38%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Rata - Rata Capaian Sasaran	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD	Nilai LHE AKIP DINSOSPMD	101,20%	94,06%	7,14%
2	Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	180,77%	89,76%	91,00%
3	Meningkatnya Pelayanan Rahabilitas sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	104,74%	79,28%	25,45%
4	Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Tersertifikasi/Akreditasi	254,90%	100,00%	154,90%
5	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Peningkatan status desa maju dan mandiri	100,00%	66,26%	33,74%
6	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00%	82,38%	17,62%

Dari tabel di atas dari sasaran yang dimiliki Dinsospmd terjadi efisiensi paling rendah 7,14% dan paling tinggi 154,90%.

Lebih lanjut dapat diinformasikan pula bahwa analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan realisasi anggaran pada tahun berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan (kas) daerah. Namun demikian ada beberapa anggaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.453.168.585 yang tersebar dalam beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan.

BAB IV PENTUP

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target Sasaran Dinsos PMD Tahun 2025 semua tercapai.
2. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.453.168.585

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2026 untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Menurunkan Angka Kemiskinan dengan Program dan Kegiatan Unggulan.
2. Penguatan Database Kemiskinan.
3. Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa untuk mempertahankan Indeks Desa Membangun Kabupaten Pangandaran yaitu 93 Desa berstatus Desa Mandiri.
4. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
5. Peningkatan Pelayanan, Pemahaman dan Pengetahuan Kinerja Aparatur ;
6. Memperbaiki sistem Pengumpulan dan Pengolahan data Kinerja agar pemenuhan indikator sasaran organisasi dapat dilaksanakan secara maksimal
7. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan agar pemenuhan indikator bisa tercapai secara maksimal.

KEPALA,
DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN



Drs. TRISNO
NIP. 19740317 199311 1 001